

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M. Huberman & M.B Miles. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Universitas Indonesia
- Abas. (2017). *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*. Depok: Alta Utama
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). *Modul Netralitas ASN: Sadar Netralitas ASN dan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Bawaslu.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif*.
- ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Mahfud, MD. (2012). *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.z
- Miftah Thoha. (1993). *Kepemimpinan dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., Muhammad, S., & Hutomo, N. (2018). *Pengawasan netralitas aparatur sipil negara (Edisi kedua)*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, F. E. T. S. D., Kusuma, R. D., Habibi, M., Umam, M. S. N., Maharani, N., Setiawan, L. M. H., & Destavino, I. (2022). *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer*.
- Setiyono, B. (2012). *Birokrasi Dalam Perspektif "Politik & Administrasi"* (Vol. 1). Nuansa.
- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Sirait, F. E. T., Pratiwi, D., Kusuma, R. D., Habibi, M., Umam, M. S. N., Maharani, N., Hendy Setiawan, L. M., & Destavino, I. (2022). *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer*. Yogyakarta: The Journal Publishing.
- Sitindjak, V. (2017). Konsep Reformasi Birokrasi. *Jurnal Inspirasi*, 8(2), 79-89.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, M. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zuhro, Siti et. al. 2007. *Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi: Menuju Daya Saing Ekonomi Daerah, Studi di Empat Provinsi*. Jakarta: The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation.

Zuhro, Siti. 2019. *Konsep Netralitas Birokrasi: Tinjauan Teoritik*. Jakarta: FGD Penegakan Netralitas (Imparsialitas) ASN.

Jurnal:

Amir, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476.

Edison, E. (2011). Meritokrasi VS Politisasi Jabatan Karir dalam Birokrasi Lokal: Sebuah Paradoks Netralitas Birokrasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 15(1), 67-76.

Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 160-194.

Firnas, M. A., Rizky, K., & Maesarini, I. W. RELASI BIROKRASI DAN POLITIK: PERSOALAN NETRALITAS BIROKRASI DALAM PILKADA DEPOK AWAL REFORMASI. *Jurnal EL-RIYASAH*, 15(1), 1-21.

Gunanto, D. (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), 87-94.

Kadir, A. (2011). Karakteristik Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Disertasi Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Makassar: Universitas Hasanuddin*.

Khaira, K. A., Annisa, D., & Saputri, N. (2020). UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020. *JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 4(2), 40-54.

Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik MIP*, 1(1), 67-74.

- Martini, R. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 66-78.
- Muh. Amin, La Ode. 2013. Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar tahun 2008). *Tesis Fisip Universitas Hasanudin*, 2013.
- Mustika, Y. A., Rasyidin, R., & Suadi, S. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 43-54.
- Nasrin, N., Wiridin, D., & Sakinah, A. M. (2024). DAMPAK KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)(Studi di Kantor Bawaslu Kota Baubau). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 41-48.
- Pradono, N. S. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).
- Putra, F., & Pratiwi, C. S. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 219-233.
- Rothstein, B. O., & Teorell, J. A. (2008). *What is quality of government? A theory of impartial government institutions. Governance*, 21(2), 165-190.
- Sanjaya, H., Yulianti, R., & Habibi, F. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, diakses dari <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/104>.
- Simamora, B. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 215-229.

- Sumarno, S. (2019). Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(2), 2-22.
- Susanti, R. Y., & Fahmi, K. (2022). Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(1), 41-49.
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 522-544.
- Tamarani, D., & Krisbintoro, R. S. (2023). TANTANGAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1306-1311.
- Winanti, S. A. (2020). Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 222-233.

Undang-Undang dan Peraturan:

- Badan Pengawas Pemilu. (2015). *Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). *Surat Edaran Nomor B/2355/M.Panrb/07/2015 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah*.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2017). *Surat Edaran Nomor B.2900/KSN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas ASN*.

- Komisi Pemilihan Umum. (2017). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018*.
- Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63.

Internet:

- Kppod.org. (24 Juni 2018). Pilkada Serentak 2918: KPPOD Temukan Pelanggaran Netralitas ASN di 5 Provinsi. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=661>.